

**KERJASAMA TEKNIK INDONESIA INDONESIA – MELANESIAN SPEARHEAD
GROUP TERHADAP KEUTUHAN NKRI di PAPUA TAHUN 2011-2014**

Oleh:

Lia Kartika Tampubolon¹

(liakartikatampubolon@yahoo.com)

Pembimbing :Drs. Idjang Tjarsono, M.Si

**Bibliografi :28 buku, 5 jurnal, 2 buletin, 2 laporan akuntabilitas, UU dan
Peraturan Presiden, dan 19 internet**

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional – Prodi Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya JL HR. Subrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28294 Telp/Fax.
0761-63277

Abstract

This research to describe why Indonesia establish technical cooperation with the Melanesian Spearhead Group. Members of Melanesian Spearhead Group is the state of race melanesia. Vision owned by the Melanesian Spearhead Group is decolonization and freedom throughout the country Melanesia. West Papua National Coalition for Liberation register as a member of the Melanesian Spearhead Group. Indonesia tried to prevent Papua be a member of the Melanesian Spearhead Group with establish technical cooperation. Directorate of Technical Cooperation divides its activities into two types; operations and activities within the framework of strengthening cooperation. The Future of Indonesian technical cooperation will depend on such things as the availability of budget, human resources and institutional. In fact, the budget for technical cooperation in the years reduced.

The perspective of realism is used to support this research. Realism introduced by Hans J. Morgenthau. Realism have an approach to realize and understand the aspects that determine the political relations among nations, and t explain the ways of these aspects relate to each other and in international political relations. This research also used theory of cooperation because Indonesia establish techincal cooperation with Melanesian Spearhead Group.

The main reason why Indonesia establish technical cooperation with the Melanesian Spearhead Group is because Indonesia wants the support of the Melanesian Spearhead Group and prevent Papua to be a member of Melanesian Spearhead Group. So that, Indonesia can maintain territorial sovereignty.

Keywords: technical cooperation, support, Melanesian Spearhead Group, West Papua National Coalition for Liberation.

¹Mahasiswa Jurusan Ilmu Hubungan Internasional angkatan 2011

Pendahuluan

Penelitian ini membahas tentang Kerjasama Teknik Indonesia – *Melanesian Spearhead Group* Terhadap Keutuhan NKRI di Papua Tahun 2011-2014. Perkembangan domestik suatu negara tidak luput dari perselisihan atau bentrokan antara satu kelompok dengan kelompok lain atau etnis tertentu yang menentang pemerintahan untuk memenuhi tuntutan mereka. Perkembangan keamanan domestik berpengaruh dalam politik luar negeri suatu negara terhadap negara lain dalam sistem internasional. Suatu negara akan berusaha menyelesaikan konflik yang ada dengan mengambil kebijakan luar negeri bekerja sama dengan negara lain seperti Indonesia yang menjalin kerja sama teknik dengan negara-negara *Melanesian Spearhead Group* dalam menjaga keutuhan NKRI di Papua.

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang menghadapi tantangan *ethnonationalism* yang cukup kuat. Gerakan *ethnonationalism* diidentifikasi pada budaya-budaya partikular yang dimiliki oleh negara tersebut banyak dari mereka mengalami diskriminasi dan menginginkan penentuan nasib sendiri. Umumnya gerakan *ethnonationalism* memiliki tujuan yang sama yaitu memisahkan diri, memilih meraih kemerdekaan dengan jalan melakukan gerakan separatisme.² Bila gerakan separatisme tersebut mendapat dukungan dan simpatik dari negara lain, tentu gerakan separatis tersebut akan mengancam integritas bangsa atau keutuhan NKRI. Organisasi Papua Merdeka merupakan salah satu gerakan *ethnonationalism* yang berkembang di Indonesia.³

Sejak menjadi bagian NKRI, sebagian penduduk Papua merasa kurang puas karena secara fakta mereka masih

marginal dan miskin. Pemerintah Pusat dinilai gagal dalam membangun kesejahteraan di Papua ditambah dengan operasi militer oleh pemerintah pusat yang diperuntukkan mengatasi pemberontakan separatisme di Papua yang dalam faktanya justru menimbulkan pelanggaran HAM. Hal ini memperkuat rakyat Papua berkeinginan untuk lepas dari NKRI.

Faktor eksternal yang mempengaruhi orang Papua untuk merdeka yaitu dukungan dari anggota negara Melanesian terhadap gerakan separatisme Papua untuk memerdekakan diri dari Indonesia.

Melanesian Spearhead Group terdiri dari negara-negara yang memiliki ras Melanesia yaitu Vanuatu, Fiji, Papua Nuigini, Kepulauan Salomon dan New Caledonia. Visi yang dimiliki oleh *Melanesian Spearhead Group* adalah dekolonisasi dan kebebasan seluruh negara Melanesia dengan upaya mengembangkan identitas dan keterkaitan budaya, politik, sosial dan ekonomi masyarakat Melanesia.⁴

Forum negara Pasifik Selatan dan organisasi bangsa-bangsa Melanesia kerap jadi ruang bagi pihak-pihak yang ingin memerdekakan Papua atau melakukan internasionalisasi terhadap Papua karena penduduk Papua memiliki ras yang sama dengan negara-negara *Melanesian Spearhead Group*. Meskipun pemerintah negara anggota Melanesian Spearhead Group mengakui integritas Papua dalam NKRI semenjak disahkannya Resolusi PBB No. 2504 pada tanggal 19 November 1969 tentang status Papua yang sah menurut hukum internasional menjadi bagian integral NKRI⁵, namun pada kenyataannya Melanesian Spearhead

⁴Pentingnya Kerja Sama Ekonomi Indonesia-Vanuatu.

<http://www.kemenkeu.go.id/Artikel/pentingnya-kerja-sama-ekonomi-indonesia-%E2%80%93-vanuatu> Diakses: Kamis 31 Oktober 2014 11:46 WIB

⁵Ikrar Nusa Bhakti. 2006. *Merajut Jaring-jaring Kerjasama Keamanan Indonesia-Australia: Suatu Upaya Untuk Menstabilkan Hubungan Bilateral Kedua Negara*. Jakarta:LIPI hal.58

² Stephen Ryan. 1995. *Ethnic Conflict and International Relations*. Dartmouth Publishing Company Limited. Hal 81

³Karen Mingst. 1998. *Essential of International Relations*. University of Kentucky hal 140-141

Group melakukan bentuk-bentuk intervensi terhadap gerakan separatisme di Papua.

Indonesia harus mengambil kebijakan yang signifikan untuk menghentikan dinamika tentang Papua, mengingat kedekatan geografis antar Indonesia dan *Melanesian Spearhead Group*.⁶ Kerja sama teknik merupakan bagian integral dari kebijakan luar negeri Kementerian Luar Negeri Indonesia dan menjadi alat diplomasi yang akan mendukung upaya-upaya diplomasi RI di forum bilateral, regional dan internasional.

Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan perspektif realis dan menggunakan teori kerjasama. Dasar normatif realisme adalah keamanan nasional dan kelangsungan hidup negara. Negara dipandang esensial bagi kehidupan warga negaranya, tanpa negara yang menjamin alat-alat dan kondisi-kondisi keamanan dan yang memajukan kesejahteraan kehidupan manusia menjadi terpencil, miskin, sangat tidak menyenangkan, tidak berperikemanusiaan dan singkat, dengan demikian negara dipandang sebagai pelindung wilayahnya, penduduknya, dan cara hidupnya yang khas dan berharga. Kepentingan nasional adalah wasit terakhir dalam menentukan kebijakan luar negeri.⁷

Melihat adanya bantuan dan dukungan dari negara anggota *Melanesian Spearhead Group* terhadap Papua Merdeka, Indonesia menempuh dengan cara damai yaitu melalui diplomasi. Bentuk diplomasi Indonesia diwujudkan dalam bentuk kerjasama Teknik dengan negara anggota *Melanesian Spearhead Group*.

Menurut K.J. Holsti, proses kerjasama atau kolaborasi terbentuk dari

perpaduan keanekaragaman masalah nasional, regional, atau global yang muncul dan memerlukan perhatian dari lebih satu negara. Masing-masing pemerintah saling melakukan pendekatan yang membawa usul penanggulangan masalah, mengumpulkan bukti-bukti tertulis untuk membenarkan suatu usul atau yang lainnya dan mengakhiri perundingan dengan suatu perjanjian atau pengertian yang memuaskan semua pihak. Menurut K.J. Holsti, kerjasama internasional dapat didefinisikan sebagai berikut:⁸

- a. Pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak sekaligus
- b. Pandangan atau harapan dari suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya akan membantu negara itu untuk mencapai kepentingan dan nilai-nilainya
- c. Persetujuan atau masalah-masalah tertentu antara dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau benturan kepentingan
- d. Aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi di masa depan yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan
- e. Transaksi antarnegara untuk memenuhi persetujuan mereka.

Kerjasama dibentuk karena setiap negara memiliki tujuannya masing-masing, oleh karena itu setiap negara merumuskan sebuah kebijakan yang menyangkut dengan kepentingan negara tersebut. Sebab atas dasar kepentingan nasional tersebut, sebuah negara akan merumuskan sebuah kebijakan. Kebijakan luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibentuk oleh para pembuat

⁶ Hilman Adil. 1997. *Kebijakan Australia Terhadap Indonesia 1962-1966: Studi Keterlibatan Australia dalam Konflik Bilateral*. Jakarta: CSIS hal.2

⁷ Robert Jackson & Georg Sorensen. 1999. *Introduction to International Relations*. New York: Oxford University Press Inc

⁸ K.J. Holsti. 1988. *Politik internasional, Kerangka Untuk Analisis, jilid II, Terjemahan M. Tahrir Azhari*. Jakarta: Erlangga Hal 652-653

keputusan suatu negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya yang dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam kepentingan nasional.⁹

Kerjasama teknik yang dilakukan Indonesia dikembangkan dalam bentuk pelatihan, pendidikan dan pengiriman tenaga ahli yang dijalin Indonesia dan negara *Melanesian Spearhead Group*. Indonesia tidak lagi hanya menjadi penerima, namun juga telah memberikan berbagai bantuan teknik kepada negara-negara sahabat. Pemberian bantuan kerjasama teknik Indonesia selama ini lebih didasarkan pada kapasitas yang dimiliki dan permintaan dari negara penerima/pihak donor yang menyediakan dana.

➤ Otonomi Khusus Papua

Faktor utama dalam masalah Papua adalah kurang jelasnya undang-undang yang ada serta terbatasnya kemampuan administrator lokal untuk mengelola sumber daya alam yang dapat diperbaharui secara berkelanjutan. Potensi konflik di dalam masyarakat dan antar penduduk setempat dengan para pendatang/ pihak luar turut meningkat, terutama akibat kesalahan dalam pengelolaan sumber daya alam, juga akibat semakin besarnya kesenjangan dan perubahan sosial yang dialami oleh banyak penduduk lokal.

Otonomi Khusus merupakan penjabaran kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dan rakyat Papua mengenai pengalihan wewenang pembangunan Papua dari pemerintah pusat kepada Papua. Otonomi khusus berorientasi pada pengakuan akan karakteristik sosial dan budaya masyarakat Papua asli dan memberi peluang untuk menangani kebutuhan-kebutuhan khusus penduduk di Papua.

Adapun elemen-elemen penting yang terdapat dalam otonomi khusus Papua antara lain:¹⁰

1. Adanya afirmasi bahwa “orang asli Papua” berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua.
2. Sistem legislatif yang bersifat bikameral, yaitu DPR Papua yang dipilih melalui pemilu, dan Majelis Rakyat Papua yang merupakan representasi kultural orang asli Papua yang memiliki kewenangan tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama. Majelis Rakyat Papua beranggotakan orang-orang asli Papua yang terdiri atas wakil-wakil adat, wakil-wakil agama, dan wakil-wakil perempuan yang jumlahnya masing-masing sepertiga dari total anggota Majelis Rakyat Papua.
3. Gubernur dan Wakil Gubernur haruslah orang asli Papua
4. Penduduk Provinsi Papua dapat membentuk partai politik. Rekrutmen politik oleh partai politik di Provinsi Papua dilakukan dengan memprioritaskan masyarakat asli Papua.
5. Provinsi Papua akan memperoleh Penerimaan khusus dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus yang besarnya setara dengan 2% dari plafon Dana Alokasi Umum Nasional, yang terutama ditujukan untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan. Selain itu juga Provinsi Papua memperoleh proporsi bagi hasil dari

⁹ T. May rudy. 2002. *Study Strategis: Dalam Transformasi Sistem Internasional Pascaperang Dingin*, Refika Aditama, Hal. 27

¹⁰ Jacobus Perviddy Solosa. 2005. *Otonomi Khusus Papua: Mengangkat Martabat Rakyat Papua di dalam NKRI*. Jakarta: Sinar Harapan

pendapatan yang berasal dari sumberdaya alam lebih besar dibandingkan daerah-daerah lainnya.

6. Penghormatan hak-hak azasi manusia, dengan kewajiban pemerintah membentuk perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Pengadilan Hak Asasi Manusia, dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Provinsi Papua sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tugas Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi adalah untuk melakukan klarifikasi sejarah Papua untuk pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia serta merumuskan dan menetapkan langkah-langkah rekonsiliasi.

Kendala-kendala yang muncul dan mengganggu efektifitas dalam penerapan Otonomi khusus itu dapat dijelaskan lebih jauh sebagai berikut¹¹:

Pertama, lambatnya penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) No 54 Tahun 2004 tentang Pembentukan Majelis Rakyat Papua. Sejak Pemerintah Provinsi Papua memasukkan Draft PP tentang pembentukan Majelis Rakyat Papua Tahun 2002, implementasi pembentukan Majelis Rakyat Papua baru dilaksanakan pada Bulan November 2005, padahal berdasarkan aturan yang ada lembaga ini harus dibentuk paling lambat satu tahun setelah UU Otonomi khusus diberlakukan.

Kedua, minimnya aturan pelaksanaan dalam bentuk Perdasi dan Perdasus. Dalam kurun penerapan UU Otonomi khusus bagi Provinsi Papua khususnya penyusunan peraturan pelaksanaan dalam bentuk Perdasi dan

Perdasus belum berjalan optimal padahal untuk mengefektifkan UU No 21 Tahun 2001 diperlukan adanya Perdasi dan Perdasus sebagai instrumen operasionalisasi dalam mewujudkan cita-cita pembangunan yang berorientasi pada perlindungan dan penegakan hak-hak dasar orang asli Papua. Hal ini dipertegas dalam pasal 75 UU No 21/2001 bahwa "peraturan pelaksanaan yang dimaksud dalam Undang-undang Otonomi Khusus ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diundangkan"

Ketiga, lemahnya konsistensi atas perlindungan dan penegakan HAM. Harus diakui implementasi UU Otonomi khusus tidak serta-merta mampu membawa perubahan signifikan dalam proses penegakan HAM di Papua. Selama penerapan UU Otonomi khusus sejumlah kasus pelanggaran HAM di Papua, semisal kasus Wamena 2003, Kasus Puncak Jaya (2004), pasca persidangan kasus filep Karma (2005) Kasus Abepura (Maret 2006) Kasus penembakan Mako Tabuni Ketua I KNPB dan masih banyak kasus lainnya yang belum tuntas diselesaikan. Undang-undang ini diharapkan mampu menjawab persoalan atau meminimalisir pelanggaran HAM yang terjadi selama ini di Papua. Terlepas dari segala kekurangan dan kelemahannya, paling tidak Otonomi khusus Papua masih dipandang sebagai salah satu peluang strategis atau pintu masuk bagi penyelesaian pelanggaran dan HAM di Papua baik pada masa lampau maupun saat ini. Walaupun hal ini tidak menjadi alasan pembenaran yang diterima oleh berbagai pihak di Papua.

Keempat, konflik pemekaran wilayah. Hal ini muncul akibat ketergesa-gesaan pemerintah dalam menjalankan kebijakan pemekaran yang sebenarnya dimaksudkan untuk mengefektifkan fungsi pelayanan pemerintahan dan pemerataan pembangunan di wilayah Papua. Kebijakan pemekaran sebagaimana dimaksud pemerintah justru memicu terjadinya konflik mengingat terbitnya Inpres Nomor 1/2003 pada tanggal 27

¹¹ Azmi Muttaqin. 2014. Otonomi Khusus Papua Sebuah Upaya Merespon Konflik dan Aspirasi Kemerdekaan Papua. Diakses dari ejournal.undip.ac.id/index.php/politika/article/download/6064/5172

Januari 2003 tentang percepatan pelaksanaan Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 yaitu pembentukan Provinsi Papua Barat, Papua Tengah, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong, dibuat tanpa melibatkan Majelis Rakyat Papua sebagaimana amanat UU Otonomi khusus.

Konflik yang terjadi baik akibat pemekaran wilayah maupun proses pergantian kekuasaan yang melibatkan elit lokal di Papua ini mengganggu efektifitas penyelenggaraan pemerintahan di beberapa daerah di Papua dan pada akhirnya mempengaruhi penerapan Otonomi Khusus sebagaimana tersirat di dalam Undang-undang Otonomi Khusus Papua yang menegaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan Undang-undang Otonomi Khusus sangat tergantung sejauh mana tata pemerintahan yang baik (*good governance*) berjalan dengan efektif dan efisien dalam kerangka melayani kepentingan publik yang lebih adil, demokratis dan *accountability*.

Kelima, keterbatasan dan lemahnya sumber daya manusia Papua dalam merespon kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar sebagaimana terkandung dalam UU Otonomi khusus. Secara objektif harus dilihat bahwa efektifitas pelaksanaan Otonomi khusus tidak hanya terkait dengan pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, tetapi juga melibatkan kesiapan sumber daya manusia Papua yang merupakan perangkat pelaksana kebijakan Otonomi khusus di lapangan. Berbagai konflik ditingkat lokal serta berkembangnya praktek korupsi memperlihatkan bahwa persoalan Otonomi khusus memiliki kaitan erat dengan kapasitas lokal dalam menerima alokasi tanggung jawab dan kewenangan yang lebih besar sesuai dengan tuntutan masyarakat selama ini.

Dana otonomi khusus Provinsi Papua dan Papua Barat ditetapkan dalam APBN 2014 dengan besaran setara 2 persen dari dana alokasi umum nasional untuk memenuhi amanat UU no. 35 tahun

2008 tentang Penetapan Perpu no. 1 tahun 2008 tentang perubahan atas UU no. 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi Papua dan Papua Barat diutamakan untuk pendanaan di bidang pendidikan dan kesehatan, selain itu dialokasikan juga dana tambahan dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus yang besarnya disepakati antara pemerintah dengan DPR berdasarkan usulan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang penggunaannya diutamakan untuk pendanaan pembangunan infrastruktur. Dana otonomi khusus untuk Provinsi Papua dan Papua Barat sebesar Rp. 4,8 triliun dan Rp. 2,0 triliun. Dana tambahan untuk pembangunan infrastruktur sebesar 2,0 triliun untuk Provinsi Papua dan Rp. 0,5 triliun untuk Provinsi Papua Barat.¹²

➤ **Percepatan Pembangunan di Papua**

Papua dilihat dari perspektif pembangunan merupakan salah satu daerah yang paling banyak tantangannya di Indonesia karena ketidakadanya pemahaman tentang konteks lokal sering menghambat upaya-upaya pembangunan yang efektif dan juga keragaman budayanya yang khas sering membuat masyarakat mempunyai prioritas dan pemahaman yang berbeda dari tujuan pembangunan.

Jenis kawasan di Papua dibagi menjadi 4 bagian antara lain:¹³

1. Kawasan Terisolir

Kabupaten dikategorikan masuk dalam kawasan terisolir karena secara umum hampir sebagian besar wilayah di kabupaten belum memiliki aksesibilitas terhadap sumber daya pembangunan baik infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan dan ekonomi kerakyatan. Contoh kabupaten yang masuk dalam kawasan terisolir yaitu Kabupaten Raja Ampat,

¹² Nota Keuangan dan APBN 2014 diakses dari www.kemenkeu.go.id

¹³ Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Provinsi Papua tahun 2011-2014 diakses dari www.bpkp.go.id

Kabupaten Tambrau, dan Kabupaten Maybrat.

Sasaran pembangunan kawasan terisolir adalah meningkatnya ketahanan pangan lokal melalui optimalisasi potensi bahan pangan lokal, berkurangnya kemiskinan dan meningkatnya perekonomian masyarakat melalui optimalisasi potensi sumber daya alam, terbangunnya infrastruktur dasar pembangunan terutama yang membuka keterisolasian wilayah melalui peningkatan aksesibilitas transportasi dan informasi serta layanan dasar (pendidikan, kesehatan, pemukiman, air bersih, ketenagalistrikan, telekomunikasi) di kawasan terisolir, semakin berpihak kebijakan kepada penduduk asli, meningkatnya keamanan dan ketertiban serta penegakan supremasi hukum di kawasan terisolir.

2. Kawasan Pedesaan

Kawasan yang secara geografis dan administratif pemerintahan berdekatan satu sama lainnya serta memiliki potensi yang besar di sektor pertanian dalam arti luas. Contoh kawasan pedesaan yaitu Kabupaten Manokwari, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Sorong, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Teluk Wondama dan Kabupaten Teluk Bintuni.

Sasaran pembangunan kawasan pedesaan yaitu meningkatnya ketahanan pangan di kawasan pedesaan, berkurangnya kemiskinan di kawasan pedesaan, terjangkau pendidikan yang bermutu dan relevan di kawasan pedesaan, meningkatnya kesehatan masyarakat, terbangunnya infrastruktur dasar pembangunan terutama yang membuka akses transportasi dan informasi serta layanan dasar kehidupan, berkembangnya ekonomi masyarakat, dan semakin berpihak kepada penduduk asli Papua.

3. Kawasan Perkotaan

Secara geografis dan administratif kawasan perkotaan di Provinsi Papua Barat meliputi 11 ibukota kabupaten/kota. Sasaran pembangunan yaitu terbangunnya infrastruktur dasar pembangunan terutama

yang membuka akses transportasi dan informasi serta layanan dasar kehidupan di kawasan perkotaan, berkembangnya ekonomi masyarakat di kawasan perkotaan, terjangkau pendidikan yang bermutu dan relevan di kawasan perkotaan, meningkatnya kesehatan masyarakat di kawasan perkotaan, semakin berpihak kebijakan kepada penduduk asli Papua, golongan ekonomi kecil dan menengah serta wanita menuju kesetaraan dalam proses pembangunan di kawasan perkotaan.

4. Kawasan Strategis

Pemilihan dan penetapan daerah administratif pemerintahan yang masuk dalam kawasan strategis berkaitan akan dibangunnya industri yang bersifat strategis dan berskala nasional. Hal ini juga berhubungan dengan konsep pembangunan kewilayahan yang tertuang dalam RTRW yang telah disetujui oleh pemerintah.

Sasaran pembangunan di kawasan strategis antara lain, terbangunnya infrastruktur dasar pembangunan terutama infrastruktur industri strategis dan pedukungnya, berkembangnya ekonomi masyarakat di kawasan strategis yang pada gilirannya akan mendongkrak perekonomian daerah di Provinsi Papua dan Nasional, semakin berpihak kebijakan kepada penduduk asli Papua, golongan ekonomi kecil dan menengah serta menuju kesetaraan jender dalam proses pembangunan di kawasan startegis, serta terbentuknya kawasan pertumbuhan ekonomi khusus dan industri strategis di Provinsi Papua.

Percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat dilaksanakan melalui kebijakan pembangunan sosial ekonomi dan kebijakan pembangunan sosial politik budaya. Kebijakan pembangunan sosial ekonomi dilakukan melalui peningkatan hasil guna dan daya guna pelayanan publik di bidang ketahanan pangan, penanggulangan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, transportasi terpadu, infrastruktur dasar,

dan pengembalian ekonomi rakyat, sedangkan kebijakan pembangunan sosial politik dan budaya dilakukan melalui pembangunan komunikasi yang konstruktif antara pemerintah dengan masyarakat provinsi Papua dan Papua Barat.¹⁴

➤ **Kunjungan Delegasi *Melanesian Spearhead Group* ke Papua**

Pada KTT *Melanesian Spearhead Group* ke-18 di Fiji, Indonesia diterima sebagai *Observer*. Pada forum ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjelaskan mengenai kondisi Papua serta mempersilakan perwakilan *Melanesian Spearhead Group* untuk datang ke Papua untuk mendengar langsung terkait kebijakan pembangunan ekonomi serta aspek keamanan di Papua dan melihat kondisi Papua.¹⁵ Hal ini dilakukan karena isu yang berkembang di dunia internasional bahwa telah terjadi pelanggaran HAM di Papua yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia.

Delegasi negara-negara Melanesia di Pasifik Selatan yang tergabung dalam forum kerjasama ekonomi regional bernama *Melanesian Spearhead Group* berada di Indonesia sejak tanggal 11 sampai 16 Januari 2014. Tema kunjungan para menteri luar negeri *Melanesian Spearhead Group* ke Indonesia adalah *Promoting Economic Ties and Development Cooperation* yang sejalan dengan tujuan pembentukan *Melanesian Spearhead Group*. Hasil kunjungan Menteri luar negeri RI dan para menteri luar negeri *Melanesian Spearhead Group* menyepakati *Joint Statement by Indonesia*

and the Members of the Melanesian Spearhead Group.¹⁶

Pada tanggal 13 Januari 2014, para Menteri Luar Negeri *Melanesian Spearhead Group* melakukan kunjungan ke provinsi Papua untuk melihat langsung kondisi di sana, sebelum kelompok yang menamakan diri mereka sebagai Koalisi Pembebasan bagi Papua Barat atau *West Papua National Coalition Liberation* masuk sebagai anggota *Melanesian Spearhead Group*. Para Menteri Luar Negeri *Melanesian Spearhead Group* diminta oleh kepala negaranya untuk memberikan laporan rekomendasi tentang apakah perlu kelompok yang menamakan dirinya Koalisi bagi Pembebasan Papua Barat menjadi anggota *Melanesian Spearhead Group*.¹⁷ Delegasi *Melanesian Spearhead Group* bertemu dengan Gubernur Papua Lukas Enembe, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Ketua Majelis Rakyat Papua, tokoh-tokoh agama, dan jajaran pejabat pemerintah provinsi Papua. Melalui kunjungan kali ini para Menteri Luar Negeri bisa melihat secara langsung tentang kondisi yang sebenarnya di Provinsi Papua dan juga mengenai pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi yang dimaksud.

Para Menteri luar negeri *Melanesian Spearhead Group* juga mengunjungi Bank Papua dan Sekolah Menengah Kejuruan di Jayapura. Para menteri luar negeri *Melanesian Spearhead Group* menyatakan antusiasme yang besar untuk meningkatkan hubungan dengan Papua,

¹⁴Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2011 Tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat Pasal 5.

¹⁵SBY Kunjungi Fiji Untuk Jelaskan Kondisi Papua. diakses dari <http://www.voaindonesia.com/content/sby-kunjungi-fiji-untuk-jelaskan-kondisi-papua/1938483.html>

¹⁶Kunjungan Negara Anggota MSG: Bangun Kemitraan Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan.

diakses dari:

http://www.kemlu.go.id/_layouts/mobile/PortalDetail-NewsLike.aspx?l=id&ItemID=a216093c-936b-4888-b56a-26a3399bd80e

¹⁷<http://id.voi.co.id/voi-berita/5291-presiden-sby-jauhkan-saudara-saudara-kita-dari-ajaran-islam-yang-menyimpang>

termasuk belajar dari pengalaman pembangunan Indonesia di Papua¹⁸

Pada tanggal 16 Januari 2014 Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah menteri luar negeri negara anggota *Melanesian Spearhead Group*, antara lain Menteri luar negeri Fiji, H.E. Ratu Inoke Kuboabola, Menteri luar negeri Kepulauan Solomon Hon. Clay Forau Soalaoi, MP, dan Menteri luar negeri Papua Nugini, Hon. Rimbink Pato, OBE, LLB, MP.

Pertemuan dengan Menteri luar negeri Fiji melahirkan kesepakatan tindak lanjut kerja sama dalam kerangka *Development Cooperation Agreement* RI-Fiji terutama di bidang konektivitas, ekonomi dan kerja sama teknik serta pelaksanaan Sidang Komisi Bersama tingkat Menteri luar negeri pertama yang akan dilaksanakan pada pertengahan tahun 2014. Peningkatan konektivitas merupakan langkah penting dalam upaya memajukan hubungan ekonomi dan *people-to-people contact* antara Indonesia dan Fiji dan juga antara Asia Tenggara dan Pasifik Selatan.

Pertemuan dengan Menteri luar negeri Solomon membahas tindak lanjut dari hasil pertemuan Presiden RI dan PM *Solomon Islands* di Bogor pada 12 Agustus 2013. Kedua menteri luar negeri sepakat untuk mengambil langkah-langkah guna mempercepat pembentukan kerangka kerja sama *Development Cooperation Agreement* antara RI dan *Solomon Islands* dalam upaya meningkatkan kerja sama bilateral di berbagai bidang. *Development Cooperation Agreement* dapat memberikan peluang yang terbuka lebar bagi peningkatan hubungan perdagangan, investasi dan pariwisata antara Indonesia dan *Solomon Islands*.

¹⁸Kunjungan Negara Anggota MSG: Bangun Kemitraan Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan.
diakses dari:
http://www.kemlu.go.id/_layouts/mobile/PortalDetail-NewsLike.aspx?l=id&ItemID=a216093c-936b-4888-b56a-26a3399bd80e

Pada pertemuan dengan Menteri luar negeri Papua New Guinea, ditandatangani perjanjian Bebas Visa untuk Paspor Diplomatik dan Dinas antara Republik Indonesia dan Papua Nugini (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Independent State of Papua New Guinea on Visa Exemption For Holders of Diplomatic And Service Passports*). Perjanjian tersebut merupakan tindak lanjut dari implementasi *Plan of Action* kemitraan komprehensif kedua negara yang ditandatangani saat pertemuan bilateral Presiden RI dan PM Papua New Guinea di sela-sela pertemuan APEC di Bali tanggal 7 Oktober 2013. Ini merupakan langkah konkrit untuk meningkatkan hubungan Indonesia–Papua New Guinea khususnya konektivitas kedua negara menyusul pembukaan penerbangan langsung antara Port Moresby dan Denpasar yang dimulai pertengahan 2013.

Pertemuan dengan ketiga menteri luar negeri anggota forum *Melanesian Spearhead Group* juga membahas isu-isu bilateral. Menurut Marty, menteri luar negeri negara-negara Melanesia itu menilai pembangunan di Provinsi Papua berjalan baik. Para Menteri luar negeri *Melanesian Spearhead Group* mendapatkan kesan baik terhadap upaya pembangunan di Papua maupun provinsi Melanesia Indonesia lainnya serta berkeinginan untuk memperkuat kerja sama antara *Melanesian Spearhead Group* dan Indonesia yang produktif dan menguntungkan.¹⁹

➤ **Kerjasama Teknik Indonesia-Melanesian Spearhead Group Tahun 2011-2014**

Kerjasama teknik merupakan bagian integral dari kebijakan luar negeri Indonesia. Kerjasama teknik menjadi *tool of diplomacy* dan diharapkan sikap negara-negara penerima bantuan akan selaras

¹⁹ RI Perkuat Hubungan dengan Negara Melanesia diakses dari
<http://www.jpnn.com/read/2014/01/16/211312/RI-Perkuat-Hubungan-dengan-Negara-Melanesia/page2>

dengan kepentingan Indonesia. Bantuan kerjasama teknik meningkatkan persahabatan dengan negara-negara yang menerima bantuan.²⁰ Kerjasama teknik yang dilakukan Indonesia pada dasarnya diarahkan untuk mencapai sasaran seperti menjamin keutuhan NKRI. Permasalahan Papua yang menjadi sorotan negara anggota *Melanesian Spearhead Group* yang memberikan dukungan kepada Organisasi Papua Merdeka ditempuh Indonesia dengan cara *people to people contact* dan menawarkan kerjasama dalam bidang-bidang yang dibutuhkan oleh negara anggota *Melanesian Spearhead Group* dengan kapasitas yang dimiliki Indonesia.²¹

Kerjasama teknik bertujuan untuk mewujudkan kemandirian dan percepatan pembangunan di negara-negara berkembang. Kerja sama teknik merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kemitraan antarnegara melalui berbagai kegiatan dalam kerangka kerja sama teknik. Kerjasama teknik diharapkan akan terjadi saling tukar informasi, pengalaman serta menciptakan dasar yang kuat bagi kerja sama antara Indonesia dan negara-negara peserta. Kerjasama teknik diharapkan dapat saling membantu dalam pembangunan untuk mengurangi ketergantungan kepada negara maju dan mengejar ketertinggalannya, terutama mengingat adanya kecenderungan jenuhnya bantuan negara-negara maju kepada negara-negara berkembang²².

Direktorat kerja sama teknik membagi kegiatannya ke dalam 2 tipe yaitu: kegiatan operasional dan kegiatan dalam rangka penguatan kerja sama. Kegiatan operasional ialah berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengembangan kapasitas bagi negara-negara berkembang lainnya. Contoh:

pelatihan, *workshop*, seminar. Kegiatan penguatan yakni kegiatan-kegiatan yang diperuntukkan untuk mengembangkan kapasitas dalam negeri. Contoh: *Training of Trainers*.

Kerjasama teknik sebagai instrumen penting dalam diplomasi maka kerjasama teknik mempercepat pencapaian sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah mengenai pemantapan politik luar negeri dan peningkatan kerjasama internasional yang terdiri dari²³;

1. Semakin meningkatnya peranan Indonesia dalam hubungan internasional dan dalam menciptakan perdamaian dunia.
2. Pulihnya citra Indonesia dan kepercayaan masyarakat internasional.
3. Mendorong terciptanya tatanan dan kerjasama ekonomi regional dan internasional yang lebih baik dalam mendukung pembangunan nasional.
4. Memelihara kebersamaan melalui kerjasama internasional, bilateral dan multilateral maupun kerjasama regional lainnya, saling pengertian dan perdamaian dalam politik dan hubungan internasional.

1. *Scholarship Program on Fisheries and Marine Human Resource Development for MSG Members (Program Beasiswa tentang Perikanan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)*

Satuan pendidikan lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan dikenal memiliki keunggulan dalam menghasilkan lulusan yang kompeten untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha dan industri kelautan dan perikanan. Hal tersebut disebabkan karena sistem pendidikan yang diterapkan adalah pendidikan vokasi dengan porsi praktek 70% dan teori 30%, yang mengarah pada pengembangan pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*) dan karakter

²⁰ Teknologi Indonesia Lebih Mudah Diterapkan di Negara Berkembang diakses dari

²¹ Kerjasama Teknik Menjadi Instrumen Diplomasi diakses dari

²² Diakses dari Kemlu.go.id

²³ *ibid*

(*character building*). Pencapaian penerapan sistem pendidikan ini telah menjadi perhatian besar bagi negara-negara yang tergabung dalam *Melanesian Spearhead Group*.

Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui BPSDMKP bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri menyelenggarakan program beasiswa pendidikan kelautan dan perikanan bagi siswa dari negara-negara *Melanesian Spearhead Group*. Program beasiswa diselenggarakan di SUPM Negeri Waiheru Ambon selama 2,5 bulan mulai 30 September hingga 16 Desember 2014. Kerjasama pendidikan ini merupakan amanah UU No 45 Tahun 2009 bahwa satuan pendidikan Kelautan dan Perikanan diarahkan menuju taraf internasional dan merupakan salah satu kebijakan Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan dalam menguatkan jejaring kerjasama internasional.²⁴

Program ini merupakan salah satu program *capacity building* Indonesia untuk negara anggota *Melanesian Spearhead Group* sebagai implementasi dari *Joint Statement* Kementerian Luar Negeri Indonesia dan negara anggota *Melanesian Spearhead Group*. Kerja sama ini dilakukan setelah negara anggota *Melanesian Spearhead Group* yang terdiri dari Menteri Luar Negeri dan Imigrasi Papua New Guinea, Rimfrink Pato, Menteri Luar Negeri Kepulauan Solomon, Soalaol Clay Foran, Menteri Luar negeri Fiji, Ratu Inoke Kubuabola, dan Deputi Dirjen Melanesia Peni Sikivon melakukan peninjauan ke SMU Perikanan Waiheru di Ambon dan mengunjungi Pelabuhan Perikanan Nusantara Tantui pada Januari 2014 untuk melihat langsung potensi perikanan yang siap di ekspor ke sejumlah negara Asia seperti Thailand, Jepang,

China, Singapura, Filipina dan Korea Selatan.²⁵

Beasiswa diberikan kepada tujuh siswa dari negara anggota *Melanesian Spearhead Group* yaitu Fiji, Solomon Islands dan Vanuatu. Tujuh siswa tersebut resmi mengikuti Pendidikan Usaha Perikanan di Sekolah Usaha Perikanan Menengah Waiheru, Ambon. Ketujuh siswa tersebut akan belajar selama 2,5 bulan.²⁶

Program beasiswa memberikan kesempatan yang besar bagi siswa negara *Melanesian Spearhead Group* untuk belajar tidak hanya substantif pendidikan, tetapi juga memahami budaya, adat, dan kebiasaan Indonesia khususnya Maluku, menjalin persahabatan serta *networking* dengan siswa, guru dan masyarakat sekitar. Program ini mengajarkan tentang bagaimana menjadi tenaga kerja siap pakai dalam industri perikanan ataupun memulai bisnis/usaha perikanan mandiri. Materi yang diajarkan mulai dari teknik penangkapan, pengolahan hasil perikanan, dan budidaya serta cara mengoperasikan mesin kapal dan mesin pengolahan.²⁷

2. International Training Program on Fisheries Processing Product for Melanesian Spearhead Group Countries/Members (Pelatihan mengenai pengolahan produk hasil perikanan)

Pelatihan mengenai pengolahan produk hasil perikanan diselenggarakan pada tanggal 7-17 Mei 2012 di Akademi Perikanan Sidoarjo, sebagai salah satu Unit

²⁴ Beasiswa Pendidikan KP Bagi Negara Melanesian Spearhead Group (MSG) diakses dari <http://www.pusdik.kkp.go.id/>

²⁵ Kerjasama Selatan-selatan dan Triangular Indonesia Mengembangkan Kerjasama Perikanan, Pendidikan dan Kebudayaan diakses dari <http://www.tabloiddiplomasi.org/current-issue/208-4-articles-januari-2015.html>

²⁶ Kerjasama Teknik, RI Berikan Asistensi Pada MSG diakses dari <http://kemlu.go.id/Pages/NewsKemlu.aspx?IDP=506&l=id>

²⁷ Kerjasama Teknik, RI Berikan Asistensi Pada MSG diakses dari <http://kemlu.go.id/Pages/NewsKemlu.aspx?IDP=506&l=id>

Pelaksana Teknis (UPT) BPSDM KP. Pelatihan ini diikuti oleh delapan peserta dari Fiji, Papua New Guinea, Solomon Island, dan Vanuatu, serta lima orang dari Indonesia. “Pelatihan internasional ini merupakan langkah nyata komitmen Indonesia dalam berbagai forum bilateral, regional, dan multilateral untuk memberikan program kerja sama teknik bagi negara-negara di kawasan Asia, Pasifik, Afrika, dan anggota *Melanesian Spearhead Group* (MSG). Tujuan dari pelatihan ini untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan seluruh peserta mengenai budidaya air tawar dan pengolahan hasil perikanan²⁸.

Pada pelatihan ini peserta mempelajari berbagai macam teknik pengolahan produk perikanan untuk memberikan nilai tambah produk dan meningkatkan kualitas produksi komoditas perikanan agar memenuhi standar gizi yang dibutuhkan.²⁹ Pasifik Selatan merupakan negara perairan sehingga memiliki hasil laut yang melimpah. Indonesia Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo pada tahun itu mengatakan bahwa tingkat konsumsi ikan masih rendah di sebagian besar negara-negara berkembang sehingga dibutuhkan solusi jitu yang tidak hanya meningkatkan produksi karena dapat mengakibatkan over produksi sementara tingkat konsumsi masih rendah, sehingga perlu dibarengi dengan peningkatan nilai tambah melalui proses pengolahan yang menghasilkan produk perikanan yang berkualitas sehingga tingkat konsumsi ikan dan pendapatan negara meningkat³⁰.

Keberhasilan Indonesia dalam pengembangan perikanan merupakan salah satu kapasitas unggul Indonesia yang telah

diakui secara luas. Ikan nila dan lele menjadi komoditas unggulan yang telah memenuhi kriteria dan dapat menjadi salah satu jawaban untuk negara anggota *Melanesian Spearhead Group* dalam menjamin ketahanan pangan mereka³¹.

3. Pembangunan *Regional Police Academy Melanesian Spearhead Group* sebesar 500 ribu dollar Amerika Serikat

Isu keamanan non-tradisional yang muncul dalam kawasan Melanesia adalah persoalan *transnational organized crimes* yang meliputi *illegal logging*, *illegal fishing*, *illegal migration*, dan kasus *trafficking*. Keseluruhan pengaruh tersebut dapat berdampak buruk dan mengganggu keadaan ekonomi, sosial, politik, dan keamanan warga negara Melanesia. Menangani persoalan *transnational organized crimes* negara anggota *Melanesian Spearhead Group* membentuk unit polisi bersama yaitu Akademi Kepolisian Regional Melanesia. Polisi-polisi yang berasal dari negara anggota *Melanesian Spearhead Group* dipilih untuk selanjutnya mengikuti pertemuan dan pembekalan khusus kemudian dikirim ke Akademi Kepolisian Regional Melanesia dan mendapatkan pelatihan khusus. Polisi-polisi yang telah mendapatkan pelatihan khusus akan diberangkatkan untuk mengontrol dan menjaga keamanan di suatu daerah yang rawan keamanannya³².

Peran polisi yang dibutuhkan oleh kawasan *Melanesian Spearhead Group* sangat penting maka Indonesia pada tanggal 7-8 Januari 2014 melalui Sekretaris Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Letjen TNI Langgeng Sulistiyono bersama delegasi melaksanakan kunjungan kerja ke Suva, Fiji, dalam rangka menyerahkan bantuan

²⁸ RI Ajari 15 Negara Cara Kelola Perikanan diakses dari <http://www.kabarbisnis.com/>

²⁹ Menteri KKP Buka Program Pelatihan Bidang Perikanan dari Pemerintah Indonesia Untuk Negara-negara Anggota MSG diakses dari <http://www.kemlu.go.id/>

³⁰ 15 Negara Asia-Afrika Belajar Perikanan di Indonesia diakses dari <http://infopublik.id/>

³¹ *ibid*

³² Pembentukan Kerjasama Sub-Regional The Melanesian Spearhead Group Tahun 1988 dalam Skripsi Lenie Marlina Zonggonau. UPN Veteran Yogyakarta

bagi pembangunan *Regional Police Academy Melanesian Spearhead Group* (MSG) sebesar USD \$ 500.000.³³

4. International Training Program on Fisheries Product Processing and Seashell Handicraft Making

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dalam rangka meningkatkan dukungan kerja sama ekonomi dan pembangunan bagi negara-negara sahabat anggota *Melanesian Spearhead Group* sebagai bentuk peran aktif Indonesia dalam mendukung pembangunan ekonomi di kawasan pasifik bekerjasama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan pelatihan bidang kelautan dan perikanan *International Training Program on Fisheries Processing Products and Seashell Handicraft Making*³⁴.

Pelatihan dilaksanakan dalam bidang pemberdayaan perempuan dalam hal mengembangkan kemampuan wanita dalam mengolah hasil perikanan dan pembuatan kerajinan kekerangan. Melalui pelatihan tersebut diharapkan peserta wanita dapat berkontribusi juga dalam pembangunan ekonomi di negaranya. Pelatihan diselenggarakan di Bali pada 28 April-2 Mei 2014. Pelatihan tersebut diikuti oleh 5 negara anggota Melanesian, diantaranya 2 peserta dari Fiji, 2 peserta dari Vanuatu, 2 peserta dari Papua Nugini, 1 peserta dari Solomon Islands, 5 peserta dari Indonesia dan 1 peserta dari Sekretariat *Melanesian Spearhead Group* yang berpusat di Vanuatu.

Peserta diberikan *best practice* yang diterapkan di Indonesia dalam pengolahan hasil perikanan yang mudah dan aplikatif seperti pembuatan bakso dan nuget ikan,

serta kerajinan kekerangan yang dapat memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Pelatihan tersebut merupakan wujud peran aktif KKP dalam mendukung isu peningkatan *Food Security, Gender Mainstreaming dan Sustainable Development Goals* yang dilaksanakan dalam kerangka kerja sama Selatan-Selatan.

Pelatihan pengolahan hasil perikanan dan kerajinan kerang tingkat internasional yang dilaksanakan di Tabanan sesuai dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki Tabanan yakni titik berat pembangunan ekonomi bergerak pada sektor pertanian termasuk perikanan dan kelautan. Potensi sumber daya perikanan dan kelautan di Tabanan dapat dijadikan salah satu potensi unggulan untuk kemajuan masyarakat Tabanan. Pemanfaatan potensi perikanan dan kelautan di Kabupaten Tabanan ditempuh melalui berbagai kebijakan, diantaranya meningkatkan kapasitas kelembagaan para pelaku usaha di bidang perikanan dan kelautan, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan bekerja dengan balai Pelaksana Penyuluhan Perikanan Banyuwangi, meningkatkan kapasitas permodalan, hingga akses pemasaran dan daya saing produk perikanan.

Simpulan

Diplomasi digunakan sebagai alat atau media untuk menyelesaikan konflik tanpa adanya kekerasan atau bahkan perang. Diplomasi merupakan pelaksanaan dari kebijakan luar negeri suatu negara. Kerjasama teknik merupakan bagian integral dari kebijakan luar negeri Indonesia. Kerjasama teknik menjadi *tool of diplomacy* dan diharapkan sikap negara-negara penerima bantuan akan selaras dengan kepentingan Indonesia. Dukungan yang diberikan negara anggota *Melanesia Spearhead Group* terhadap Organisasi Papua Merdeka karena persamaan ras membuat Indonesia mengambil kebijakan

³³Suva, Fiji, Dalam Rangka Penyerahan Bantuan Pembangunan Regional Police Academy

³⁴ BPSDM KP Tingkatkan Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Bagi Negara-negara MSG melalui Pelatihan diakses dari <http://www.bpsdmkp.kkp.go.id/>

soft power dengan upaya diplomasi menggunakan kerjasama teknik yang pada dasarnya diarahkan untuk mencapai sasaran seperti menjamin keutuhan NKRI.

Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Marty Natalegawa bersama dengan Menteri Luar Negeri negara anggota *Melanesian Spearhead Group* telah mengeluarkan *Joint Statement* pada tanggal 15 Januari 2014. *Joint Statement* tersebut berisikan pengakuan kedaulatan masing-masing negara, pembentukan forum konsultasi tingkat menteri dan *road map* program kerja sama ekonomi, sosial budaya dan peningkatan kapasitas terutama bagi Negara-negara *Melanesian Spearhead Group*.

Upaya diplomasi tersebut membuahkan hasil untuk membendung permintaan *West Papua National Coalition for Liberation* menjadi anggota *Melanesian Spearhead Group* akan ditolak oleh negara anggota *Melanesian Spearhead Group* dengan pertimbangan sesuai prosedur *West Papua National Coalition for Liberation* bukan wakil rakyat Papua secara keseluruhan.

Referensi

BUKU

- Abdul Irsan.** 2010. *Peluang dan Tantangan Diplomasi Indonesia*. Jakarta: Himmah Media
- Alan C. Isaak.** 1981. *Scope and Methods of Political Science, An Introduction to The Methodology of Political Inquiry*, The Dorsey Press
- Al Chaidar.** 2000. *Federasi atau Disintegrasi*. Yogyakarta: Madani Press
- Anak Agung Banyu Perwita & Yanyan Mochammad Yani.** *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2006
- B.N. Marbun.** 2005. *Kamus Analisa Politik*. Jakarta: CV. Mulia Sari
- George Junus Aditjondro.** 2000. *Cahaya Bintang Kejora: Papua Barat Dalam Kajian Sejarah, Budaya, Ekonomi dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Elsam

- Hans. J. Morgenthau dan Kenneth W. Thompson.** 2010. *Politik Antar Bangs.*, terj. S. Maimoen, at al, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Haris Syamsudin.** 1999. *Indonesia di Ambang Perpecahan*. Jakarta: Erlangga
- Jack C. Plano dan Roy Olton.** 1999. *Kamus Hubungan Internasional*, Jakarta: Putra A Bardin.
- Jerel A. Rosati, Joe D. Hagan, Martin W. Sampson.** 1994. *Foreign Policy Restructing: How Government Respon to Global Change*. University of South Carolina Press
- Karen Mingst.** 1998. *Essential of International Relations*. University of Kentucky
- KJ.Holsti.** 1992. *International Politics: A Framework for Analysis*. Englewood Clifs: Prentice Hall
- Mochtar Kusumaadmadja.** 1983. *Politik Luar Negeri Indonesia dan Pelaksanaannya Dewasa ini*. Bandung: Alumnus
- Mohtar Mas'oed.** 1990. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. LP3S. Jakarta.
- R Soeprapto.** 1997. *Hubungan Internasional: Sistem, Interaksi dan Perilaku*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Richard W. Mansbach dan Kirsten L. Rafferty.** 2008. *Introduction to Global Politics*, New York: Routledge
- Robert Jackson & Georg Sorensen.** 1999. *Introduction to International Relations*. New York: Oxford University Press Inc.
- Scott Burchill.** 2005. *Theories of International Relations: Third edition*. New York: Palgrave Macmillan
- Simon Fisher dkk.** 2004. *Mengelola Konflik, Keterampilan dan Strategi Untuk Bertindak*. Jakarta: The British Council
- Stephen Ryan.** 1995. *Ethnic Conflict and International Relations*. Dartmouth Publishing Company Limited

Sumpena Prawira Saputra. 1984. *Politik Luar Negeri Republik Indonesia: Suatu Model Pengantar*. Bandung: Remadja Karya

Syamsur Dam. 1996. *Kerja sama ASEAN, Latar Belakang, Perkembangan dan Masa Depan*. Ghalia Indonesia: Jakarta

Tengku Hasan Muhammad Di Tiro. 1999. *Masa Depan Politik Dunia Melayu*

Theodore A. Coloumbis & James E. Wolf. 1999. *Pengantar Hubungan Internasional: Keadilan dan Power*. Bandung: Putra A. Bardin

T. May rudy. 2002. *Study Strategis: Dalam Transformasi Sistem Internasional Pascaperang Dingin*, Refika Aditama

Vivienne Jabri. *Reflections on the Study of International Relation*, dalam Trevor Salmon, dan Mark F. I. 2008. *Issues in International Relations (Second Edition)*, New York: Routledge.

JURNAL

Nurani Chandrawati. 2005. *Menelaah Hubungan Timbal Balik Antara Konflik Internal Dengan Masalah Kemiskinan*, Jurnal Global, Vol.8 no.1, Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fisip, UI, Depok

Masyad, Dhurorudin. 2001. *Pemisahan Dini Vs Otonomi: Mencari Akar Kemelut Irian Jaya*. Jurnal Analisis CSIS tahun xxx/2001. No.3. *Konflik Sosial: Tantangan Domestik dan Global*. Jakarta.

Nusa Bhakti, Ikrar. 2000. *Kebijakan Luar Negeri Indonesia di Pasifik: Upaya Mencegah Separatisme*. Jakarta: Deplu

Tim Jurusan Hubungan Internasional Universitas Airlangga. 2003. *Final Report: Kebijakan RI di Pasifik*. Jakarta: Deplu

BULETIN

Jendela Direktorat Kerjasama Teknik Edisi No. 1/Juni/2014

Jendela Direktorat Kerjasama Teknik Edisi No. 2/Oktobre/2014

UNDANG UNDANG & PERATURAN

UU Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2011 Tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat
Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2013 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014

SITUS/WEBSITE

www.bpsdmkp.kkp.go.id

www.dephan.com

www.ditpolkom.bappenas.go.id

www.google.com

www.infopublik.id

www.kabarbisnis.com

www.kemenkeu.go.id

www.kemlu.go.id

www.melanesianews.com

www.msgcc.info

www.polkam.go.id

www.politik.kompasiana.com

www.portal.bpppbanyuwangi.com

www.pusdik.kkp.go.id

www.scholar.google.com

www.tabanankab.go.id

www.tabloiddiplomasi.org

www.tribunnews.com

www.westpapuainfo.wordpress.com